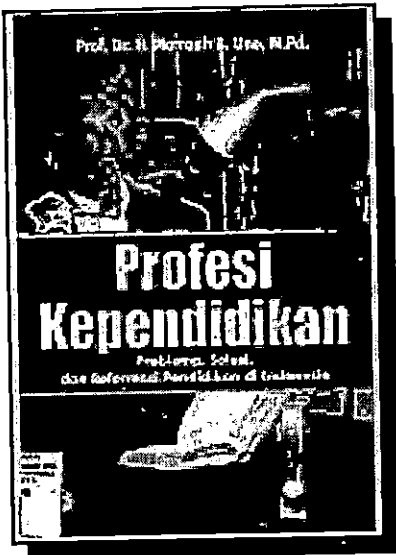


## Resensi

# Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia



*Judul* : Profesi Kependidikan  
*Penulis* : Hamzah B. Uno  
*Penerbit* : PT Bumi Aksara Jakarta  
*Cetakan* : Pertama, tahun 2007  
*ISBN* : 979-010-171-6  
*Tebal* : ix + 146 halaman

**M**asalah pendidikan menjadi isu menarik dalam kaitannya dengan input, proses dan produk yang bermuara pada sumber daya manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Disisi lain aspek pendidikan dapat dicermati berbagai keterkaitan, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, politik, agama, budaya dan keamanan sebagai jaringan obyek permasalahan.

Dalam wilayah keindonesiaan persoalan pendidikan menjadi kajian yang cukup serius karena secara yuridis masalah pendidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertanyaan yang mendasar adalah dalam hal apa pendidikan itu bersinergi dengan masalah sosoal, ekonomi, politik, agama dan masalah lainnya baik dalam hal teori maupun aplikasinya? Dan hambatan-hambatan apa yang menjadikan pendidikan di Indonesia kurang diperhitungkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dilihat jawabannya dalam uraian Hamzah B. Uno dalam telaah karya bukunya tentang "Profesi Kependidikan : Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia".

Secara garis besar Hamzah B.Uno yang pakar dibidang pendidikan mempetakan bahasannya menjadi X (sepuluh) bab yang satu sama lain punya

keterkaitan. Bab I diawali dengan kajian berbagai masalah pendidikan yang dihadapkan pada aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik berkaitan dengan masalah globalisasi yang mengisyaratkan peniadaan sekat keterbatasan dalam setiap dimensi kehidupan. Dahulu peradaban manusia tidak dapat diketahui, sekarang dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini apa saja yang terjadi dibelahan bumi Timur terakses kemana-mana dalam limit waktu yang relatif singkat. Persoalan mendasar berkaitan dengan globalisasi ini adalah bagaimana permasalahan globalisasi itu ditangkap dan diolah melalui proses pendidikan terutama di era reformasi bangsa Indonesia secara positif. Sebab apabila persoalan globalisasi hanya bertengger pada aspek kemodernan maka seperti yang digambarkan oleh Achmad Charis Zubeir yang diulas dalam rubrik Kedaulatan Rakyat (Jum'at, 28 Desember 2007) bahwa, dunia moderen punya tiga pilar penopang utama, yaitu ilmu pengetahuan yang mendorong teknologi tinggi sehingga menyebabkan manusia bersifat sekuler, lebih mementingkan dunia. Kedua pandangan yang berpaham liberalisme humanisme, serta yang ketiga sistem kapitalisme dalam ekonomi. Ketiganya membawa konsekuensi logis baik dampak positif maupun negatif. Dalam kaitan ini Hamzah meletakkan agenda masa depan untuk membuat tatanan internal baru dalam tubuh bangsa Indonesia. Reformasi yang telah kita terima keberadaanya di negara ini adalah bentuk agenda masa depan yang dimaksud. Reformasi menjadi wujud pertaubatan kita secara total terhadap berbagai kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dengan demikian ritus-ritus pertaubatan (reformasi) itu harus benar-benar berjalan hikmat, sistematis dan tepat pada sasaran yang diinginkan.

Manajemen pendidikan kita harus melihat seberapa jauh kekuasaan pembuatan kebijaksanaan pendidikan itu tersentralisasi atau terdesentralisasi. Demikian juga kita harus mengamati seberapa jauh masyarakat terlibat dan ikut berperan dalam proses pengelolaan pendidikan. Berperannya masyarakat dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan.. Dengan pengontrolan ini pendidikan tidak akan dikebiri prosesnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk ini maka perlu ada perubahan paradigma yaitu, perubahan paradigma dan orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar, perubahan dan orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada demokrasi, perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan dan perubahan sistem pemerintahan yang membatasi pada batas dan aturan yang mengikat suatu negara yang jelas menjadi tatanan pemerintahan yang cenderung *Boundaryless Organization*. Perubahan-perubahan paradigma tersebut maka pengelolaan pendidikan perlu menyesuaikan dan perlu dilakukan *repositioning*. Dalam kaitan ini maka visi pendidikan hendaknya diarahkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan paradigma tersebut. Tanpa menafikan unsur kekurangannya secara kuantitatif pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Indikator keberhasilan pendidikan ini dapat dilihat pada kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Hal ini sebagai akibat dari program pemerataan pendidikan, terutama melalui INPRES SD yang dibangun pada rezim Orde Baru. Namun demikian keberhasilan dari segi kualitatif

pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif, apalagi yang tinggi. Hal tersebut akan membuat mereka unggul (hal.6). Untuk ini perlu kiat untuk dikedepankan yaitu, (1) bagaimana memberdayakan lembaga pendidikan agar menjadi lembaga *human investment*? (2) hal-hal apakah yang perlu dilakukan agar otonomisasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan baik? Dua hal ini merupakan persoalan yang memerlukan pencerahan dari berbagai pakar dan praktisi pendidikan.

Menjawab dua hal tersebut dalam bab II ditawarkan dan sekaligus dipertanyakan sepuluh perubahan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia, yaitu : (1) pendidikan sebagai proses pembelengguan atau proses pembebasan, (2) pendidikan sebagai proses pembodohan atau proses pencerdasan, (3) pendidikan sebagai proses perampasan hak anak-anak atau justru menjunjung tinggi hak anak-anak, (4) pendidikan menghasilkan tindak kekerasan atau menghasilkan tindak perdamaian, (5) pendidikan sebagai proses pengebirian potensi manusia atau pemberdayaan potensi manusia, (6) pendidikan untuk memecah wawasan manusia atau menyatukan wawasan manusia, (7) pendidikan sebagai wahana disintegrasi atau justru wahana mempersatukan bangsa, (8) pendidikan menghasilkan manusia otoriter atau menghasilkan manusia demokratis, (9) pendidikan menghasilkan manusia apatis terhadap lingkungan atau responsif dan peduli terhadap lingkungan, serta (10) pendidikan hanya terjadi di sekolah atau bisa terjadi di mana-mana (hal.9)

Dari sepuluh item tersebut sebagaimana besar Hamzah memposisikan pada ranah kondisi yang negatif. Seperti pada persoalan

pendidikan sebagai proses pembebasan, dikatakan bahwa pendidikan kita masih terkesan sebagai pendidikan yang membelenggu. Pembelengguan ini bersumber dari ketidakjelasan visi dan misi pendidikan kita, juga adanya praktik sentralisasi dan uniformitas, serta sistem pendidikan dengan konsep *delivery system* (sistem penyampaian/ pemberitaan). Di sini terjadi praktik pendidikan yang mengalir dari atas ke bawah (*top-down*), yang kurang memperhatikan faktor hak-hak anak secara demokratis dan kreatif, serta kurangnya pemberian kesempatan kepada mereka untuk melakukan rekayasa dalam aktivitas pendidikannya. Sistem pendidikan yang membelenggu ini pada gilirannya akan menghasilkan manusia yang stereotik, penurut, tidak kreatif, bahkan memiliki ketergantungan tinggi. Hal tersebut akan membuat mereka menjadi beban sosial, tidak mandiri, bahkan tidak memiliki jati diri. Pendidikan demikian dapat dinyatakan sebagai sistem pendidikan tertutup, kurang memberikan kebebasan dan pengalaman kepada para pelajar untuk berkreasi (hal.9-10).

Bab III membahas tentang profesionalisme guru, yang diawali pembahasannya tentang hakekat profesi guru. Pada bagian ini diuraikan tentang guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan. Dalam kaitan ini diterangkan bahwa untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Untuk membangun citra guru sebagai sosok pendidik yang profesional maka sudah

seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan pengetahuan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang ataupun *up grading* dan/atau pelatihan yang bersifat *in service training* dengan rekan-rekan sejawatnya. Disisi lain perubahan dalam cara mengajar guru dapat dilatihkan melalui peningkatan kemampuan mengajar sehingga kebiasaan lama yang kurang efektif dapat segera terdeteksi dan perlahan-lahan dihilangkan (hal.17).

Pada bab V mengulas tentang perunya menyiapkan landasan bagi pengambilan keputusan secara memuaskan tentang metode pengajaran dan kegiatan belajar yang efektif. Ini perlu untuk menjalin agar sebagian besar siswa dapat menguasai sasaran pengajaran pada tingkat pencapaian yang dapat diterima, dalam jangka waktu yang sesuai. Hal ini dituntut siswa belajar mandiri sesuai dengan kecepatannya dengan cara membaca, mengerjakan tugas pada lembar kerja, memecahkan masalah, laporan praktikum. Interaksi guru dengan siswa dan antar siswa terjadi melalui tanya jawab, diskusi, kegiatan kelompok kecil, tugas yang harus diselesaikan, dan laporan (hal.43).

Pada bab VI diawali dengan pernyataan bahwa guru yang profesional memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. Mensitir pendapat Munsyi, bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi menunjuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan. *Performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga meliputi perihai yang tidak tampak (hal.61).

Pada bab VII ditegaskan bahwa sistem pendidikan selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. faktor Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi yang "menggurita" sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah, bahkan terkesan semakin buruk dalam era desentralisasi ini. Ironisnya kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang "dikendalikan". Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang "pasti" tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat sistem pendidikan kita tidak pernah berhenti dari keterpurukan (hal.83).

Pada bab VIII dibahas tentang peran teknologi dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Teknologi memberikan andil yang besar dalam memberikan alur informasi, sekaligus membantu mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Pembahasan ini dimulai dengan makna teknologi sebagai pengenalan awal. Setelah memperkenalkan berapa makna teknologi dari para pakar, Hamzah memaparkan arti teknologi ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh,

pancaindera, dan otak manusia. Hanya perlu diingat penyediaan alat teknologi dalam proses pendidikan juga harus melihat sikon. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Dalam kaitan ini maka timbul pertanyaan, kurikulum apa yang dapat memberikan bekal kepada peserta didik di jenjang pendidikan dasar sehingga mereka dapat diarahkan kepada masyarakat yang "sadar teknologi" atau masyarakat yang "melek teknologi". (hal.101-103).

Peran guru dalam pengembangan media pembelajaran di era teknologi komunikasi dan informasi menjadi topik inti dalam bab IX sebagai kelanjutan bahasan tentang alur pembelajaran. Dalam bahasan ini dikemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan sumber belajar. Yang inti dari rencana pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Fokus utama dalam perancangan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran (hal.110). Pemilihan metode pembelajaran harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran.

Ada tiga prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam upaya menetapkan metode pembelajaran, yaitu :

- (1) tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dalam semua kondisi;

- (2) metode (strategi) pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda dan konsisten pada hasil pembelajaran;

- (3) kondisi pembelajaran yang berbeda bisa memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pembelajaran (hal.110)

Agar tidak salah dalam menerapkan media dalam metode pembelajaran, dalam ulasan bab ini diuraikan tentang makna media, jenis dan klasifikasi media, peran media hingga pemakaian media yang berbasis komputer (hal.113-129).

Pada bab X yang merupakan bab terakhir, dikupas tentang mengurai benang kusut pendidikan di era otonomi Pendidikan. Hamzah menggugah kita dengan pernyataan yang arif tapi penuh makna antara lain, jika kita renungi pembangunan pendidikan di Indonesia, sungguh mengundang kita semua untuk dapat mencermati betapa pendidikan di Indonesia baru sekadar mampu memberikan dampak langsung pendidikan yang diwujudkan dengan ijazah, tetapi belum sampai memberikan dampak pengiring pengajaran yang indikatornya adanya kemampuan daya saing sumber daya manusia, baik untuk memenuhi tuntutan dunia usaha maupun tuntutan dunia industri, apalagi persaingan dalam kancah percaturan dunia (hal. 130).

Karya Hamzah B. Uno ini sangat bagus untuk dibaca, karena sarat dengan informasi dan dinamika pendidikan baik dalam dan luar negeri agar kehidupan kita kaya akan wacana pemikiran dan apa yang diperbuat oleh pihak lain. Hanya dalam buku ini kurang mengakomodasi istilah tertentu seperti dosen, mahasiswa yang secara emosional banyak terlibat dalam arus dinamika pendidikan dan hanya banyak menyinggung istilah guru, padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005

menyebutkan tentang guru dan dosen. Disamping itu untuk lebih lengkapnya kalau bahasan ini banyak mengacu pada tiga aturan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

*Amir Mu'allim*

